

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan kepada seluruh pimpinan pencipta arsip untuk menetapkan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum mengakomodir seluruh fungsi yang ada di unit kerja Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dan belum menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
4. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
5. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

6. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
7. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.
8. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan.
9. Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
10. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kemen PPPA dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Pengolah dan Unit Kearsipan dalam menentukan keterbukaan dari kerahasiaan Arsip untuk melindungi hak dan kewajiban Kemen PPPA dan pengguna dalam pelayanan Arsip.

Pasal 3

Penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kemen PPPA bertujuan untuk:

- a. mendukung pengelolaan Arsip Dinamis yang efektif dan efisien;
- b. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
- c. mengatur akses Arsip Dinamis yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kemen PPPA terdiri atas:
 - a. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif; dan
 - b. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Substantif.
- (2) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II
KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Kategori Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis di Kemen PPPA dibagi menjadi 3 (tiga) tingkat yaitu:
 - a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas; dan
 - c. Rahasia.
- (2) Penentuan tingkat kategori klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi di Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Kemen PPPA.

Pasal 6

- (1) Sarana Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kemen PPPA menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk menyimpan Arsip Rahasia;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Sarana perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.

Pasal 7

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas *Closed Circuit Television* (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan Arsip.
- (2) Pengamanan Arsip kategori Biasa/Terbuka disimpan pada rak besi, Arsip kategori Terbatas disimpan pada *filing cabinet* atau lemari Arsip dan Arsip kategori Rahasia disimpan pada lemari besi atau brankas.

BAB III

KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 8

- (1) Arsip Dinamis di Kemen PPPA dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri dapat mengakses seluruh Arsip Kemen PPPA;
 - b. pimpinan tinggi madya dapat mengakses Arsip sesuai kewenangannya dan Arsip di luar kewenangannya setelah mendapatkan izin dari Menteri dan/atau Pimpinan Tinggi Madya pencipta arsip;
 - c. staf khusus dapat mengakses Arsip di luar kewenangannya setelah mendapatkan izin dari Menteri dan/atau Pimpinan Tinggi Madya pencipta arsip sesuai kewenangannya;
 - d. pimpinan tinggi pratama dapat mengakses Arsip sesuai dengan kewenangannya dan Arsip di luar kewenangannya setelah mendapatkan izin dari Pimpinan Tinggi Madya pencipta arsip sesuai kewenangannya;
 - e. arsiparis dan pelaksana hanya dapat mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab,

- tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi biasa; dan
- f. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta arsip dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengawas eksternal yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aparat penegak hukum yang mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum; dan
 - c. publik yang hanya dapat mengakses informasi yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan PPID.

Pasal 9

Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi sebagai berikut:

- a. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan tingkat/derajat klasifikasi Biasa/Terbuka tidak ada persyaratan/prosedur khusus;
- b. penyampaian informasi arsip dinamis dengan tingkat/derajat klasifikasi Terbatas dengan amplop segel; dan
- c. Penyampaian informasi arsip dinamis dengan tingkat/derajat klasifikasi Rahasia menggunakan:
 - 1. warna kertas yang berbeda;
 - 2. diberi kode rahasia;
 - 3. menggunakan amplop dobel;

4. amplop segel dan stempel rahasia;
5. konfirmasi tanda terima; dan
6. harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1637

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PR	PERENCANAAN					
1	PR.01	Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan					
	PR.01.01	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ <i>Master Plan</i> (RPJP)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	PR.01.02	b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PR.01.03	c. Rencana Strategis (Renstra)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	PR.01.04	d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
2	PR.02	Rencana Kerja					
	PR.02.01	a. Usulan kegiatan unit kerja beserta data pendukung	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	PR.02.02	b. Rencana Kerja Tahunan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	PR.02.03	c. Rencana kerja berdasar pagu indikatif	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	PR.02.04	d. Inisiatif baru/ <i>new inisiatif</i>	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PR.03	Penetapan/Kontrak Kinerja					
	PR.03.01	a. Pimpinan tertinggi (Menteri/Kepala Badan/ Direktur, etc)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak Memiliki dampak yang menggangu fungsi dan tugas instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	PR.03.02	b. Pimpinan unit kerja	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak Memiliki dampak yang menggangu fungsi dan tugas instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	PR.03.03	c. Staf/pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
4	PR.04	Perencanaan Anggaran					
	PR.04.01	a. Penyusunan rencana anggaran (RKAKL, DIPA, POK)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	PR.04.02	b. Perencanaan PNB	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	PR.04.03	c. Standarisasi harga satuan rencana barang	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi	Publik,	Tidak memiliki	Bagian Penyusunan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	dampak yang mengganggu kinerja instansi	Program dan Anggaran
	PR.04.04	d. Standar Biaya Keluaran	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
5	PR.05	Revisi Anggaran					
	PR.05.01	a. Revisi DIPA dan POK	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	PR.05.02	b. Anggaran Biaya Tambahan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	PR.05.03	c. APBN Perubahan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
6	PR.06	Laporan					
	PR.06.01	a. Laporan berkala					
		1) Laporan bulanan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Evaluasi dan Pelaporan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) Laporan triwulan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
		3) Laporan semesteran	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
		4) Laporan tahunan unit kerja	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
		5) Laporan tahunan lembaga/instansi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	PR.06.02	b. Laporan khusus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	PR.06.03	c. Laporan perkembangan tahapan kegiatan/ <i>progress report</i>	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	PR.06.04	d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Evaluasi dan Pelaporan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PR.07	Evaluasi Program					
	PR.07.01	a. Evaluasi program unit kerja	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	PR.07.02	b. Evaluasi program kementerian	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
II	KL	KERJASAMA LEMBAGA					
1	KL.01	Kerjasama Dalam Negeri MoU/kontrak/perjanjian kerjasama dalam negeri - Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum - Risalah pembuatan MoU - Rancangan/draft awal - Rancangan/draft akhir - Memori perjanjian - Naskah asli yang ditandatangani	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Kerjasama

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	KL.02	Kerjasama Luar Negeri MoU/kontrak/perjanjian kerjasama dalam negeri - Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum - Risalah pembuatan MoU - Rancangan/draft awal - Rancangan/draft akhir - Memori perjanjian - Naskah asli yang ditandatangani	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu hubungan kerjasama luar negeri	Bagian Kerjasama
III	HK	HUKUM					
1	HK.01	Program Legislasi					
		- Bahan/materi program legislasi nasional - Program legislasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
2	HK.02	Produk Hukum					
	HK.02.01	a. Produk hukum yang bersifat pengaturan - Peraturan Menteri - Instruksi Menteri - Surat Edaran Menteri, dll	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
	HK.02.02	b. Produk hukum yang bersifat penetapan - Keputusan Menteri - Keputusan Sekretaris Menteri - Surat Perintah, dll	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	HK.03	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan (NSPK)					
		<ul style="list-style-type: none"> - Naskah Akademik - Penyusunan draft awal - Penyusunan draft akhir - Penetapan pedoman/standar/juklak/juknis dan protap Kemen PPPA 	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
4	HK.04	Dokumentasi dan Informasi Hukum					
		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang - Peraturan Pemerintah - Keputusan Presiden - Peraturan-peraturan lain yang dijadikan referensi 	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
5	HK.05	Sosialisasi, Penyebarluasan Informasi dan Pembinaan Hukum					
	HK.05.01	a. Sosialisasi produk hukum	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
	HK.05.02	b. Penyebaran informasi produk hukum	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
	HK.05.03	c. Pembinaan hukum	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	HK.06	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi					
	HK.06.01	a. Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi pidana	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
	HK.06.02	b. Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi perdata	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
	HK.06.03	c. Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi tata usaha negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
	HK.06.04	d. Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi ketenagakerjaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	HK.06.05	e. Bantuan dan konsultasu hukum/advokasi internasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
7	HK.07	Kasus/Sengketa Hukum					
	HK.07.01	a. Kasus atau sengketa hukum pidana <ul style="list-style-type: none"> - Proses pemeriksaan - Penyelidikan - Penyidikan - Penangkapan - Penahanan - Penuntutan 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak dalam proses penegakan hukum	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
	HK.07.02	b. Kasus atau sengketa hukum perdata <ul style="list-style-type: none"> - Panggilan sidang - Berkas panggilan banding - Berkas panggilan kasasi - Telaah hukum dan opini hukum - Berkas peninjauan kembali, dll 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak dalam proses penegakan hukum	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	HK.07.03	c. Kasus atau sengketa hukum tata usaha negara - Panggilan sidang - Panggilan banding, memori banding, putusan banding - Panggilan kasasi, memori kasasi, putusan kasasi - Panggilan peninjauan kembali, memori PK, putusan PK	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak dalam proses penegakan hukum	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
	HK.07.04	d. Kasus atau sengketa hukum arbitrase - Berkas panggilan - Jawaban <i>hearing</i> - Kontra memori, alat bukti tambahan, saksi - Putusan arbitrase, dll	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak hukum	Memiliki dampak dalam proses penegakan hukum	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
8	HK.09	Perizinan (Sejak Permohonan sampai dengan Diterbitkannya Surat Izin)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
10	HK.10	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)					
	HK.09.01	a. Hak cipta	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
	HK.09.02	b. Hak paten 1) Paten biasa/terbuka	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) Paten sederhana	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang- undangan
	HK.09.03	c. Hak merk	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang- undangan
	HK.09.04	d. Permohonan hak yang ditolak (hak cipta, paten, desain industri, merk, rahasia dagang, desaian tata letak sirkuit terpadu)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang- undangan
IV	OT	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN					
1	OT.01	Organisasi					
	OT.01.01	a. Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi - Analisa organisasi - Pembentukan - Perubahan - Pembubaran	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	OT.01.02	b. Evaluasi organisasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	OT.02	Tata Laksana					
	OT.02.01	a. Sistem dan prosedur kerja - SOP/prosedur tetap	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	OT.02.02	b. Pembakuan sarana kerja	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	OT.02.03	c. Kajian/analisis jabatan/analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan - Analisis organisasi - Uraian jabatan - Analisis beban kerja - Peta jabatan - Evaluasi jabatan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	OT.02.04	d. Standar kompetensi jabatan - Struktural - Fungsional	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
3	OT.3	Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
V	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT					
1	HM.01	Keprotokolan					

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	HM.01.01	a. Upacara kedinasan (upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, serah terima jabatan, peresmian) - Undangan/pemberitahuan - Susunan acara - Berita acara - Naskah serah terima - Sambutan/pidato	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
	HM.01.02	b. Kunjungan kedinasan - Kunjungan dinas pimpinan lembaga/ instansi/tamu negara - Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
	HM.01.03	c. Agenda kegiatan pimpinan - Jadwal kegiatan pimpinan, dll.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
	HM.01.04	d. Daftar nama dan alamat pejabat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Humas dan Protokol
	HM.01.05	e. Dokumentasi/liputan kegiatan pimpinan dalam acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
	HM.01.06	f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan					

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) Kliping koran	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
		2) Brosur/ leaflet/poster	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
		3) Pengumuman/pemberitaan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
2	HM.02	Hubungan antar Lembaga					
	HM.02.01	a. Hubungan pemerintahan (eksekutif, yudikatif, legislatif)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
	HM.02.02	b. Hubungan dengan perguruan tinggi/ sekolah termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG), Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
	HM.02.03	c. Hubungan dengan Forum Kehumasan/ Bakohumas/Perhumas	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
	HM.02.04	d. Hubungan dengan Media Massa					

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Siaran pers/konferensi pers/ <i>press release</i>	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
		- Kunjungan wartawan/peliputan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
		- Wawancara	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
3	HM.03	Hearing (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR					
		- Surat undangan dari DPR - Bahan/materi RDK - Laporan/hasil RDK	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki Dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Bagian Humas dan Protokol

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	HM.04	Bahan/Materi Pidato/Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki Dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Bagian Humas dan Protokol
5	HM.05	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
6	HM.06	Publikasi Melalui Media Cetak maupun Elektronik	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
7	HM.07	Pameran/Sayembara, Festival	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
8	HM.08	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
9	HM.09	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	HM.10	Layanan Informasi Publik (PPID) - Prosedur layanan informai publik - Laporan layanan informasi public - Aspirasi publik	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
VI	TU	TATA USAHA					
1	TU.01	Risalah/Notulen Rapat Pimpinan dan Rapat Staf					
	TU.01.01	a. Rapat pimpinan - Surat undangan - Materi rapat - Daftar hadir - Risalah/notulen rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	TU.01.02	b. Rapat unit kerja/satker - Surat undangan - Materi rapat - Daftar hadir - Risalah/notulen rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	TU.01.03	c. Rapat staf - Surat undangan - Materi rapat - Daftar hadir - Risalah/notulen rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
VII	KA	KEARSIPAN					
1	KA.01	Penciptaan Arsip					

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KA.01.01	a. Pengelolaan surat masuk - Agenda surat masuk (manual/elektronik) - Tanda terima	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KA.01.02	b. Pengelolaan surat keluar - Buku agenda penomoran surat (manual/ elektronik) - Daftar surat pertinggal - Nota dinas permintaan unit kerja - Buku pendistribusian	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
2	KA.02	Pemeliharaan Arsip					
	KA.02.01	a. Pemberkasan - Daftar arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KA.02.02	b. Penataan Arsip - Daftar arsip inaktif	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KA.02.03	c. Penyimpanan					
		1) Skema penataan arsip	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) Peta lokasi penyimpanan arsip	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
		3) <i>Cheklis</i> pengaturan suhu dan temperatur ruang penyimpanan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
		4) Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KA.02.04	d. Alih media arsip - Berita acara alih media arsip - Daftar arsip yang dialih mediakan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KA.02.05	e. Akses penggunaan arsip - Buku peminjaman arsip - Formulir peminjaman	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
3	KA.03	Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga - Daftar arsip vital - Daftar arsip terjaga - Berita acara penyerahan salinan arsip terjaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
4	KA.04	Penyusutan Arsip					

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KA.04.01	a. Pemindehan arsip inaktif - Berita acara pemindehan arsip - Daftar arsip yang dipemindehan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KA.04.02	b. Pemusnahan arsip - SK tim pemusnahan - Surat usulan pemusnahan - Rekomendasi/pertimbangan/persetujuan pemusnahan dari Kepala ANRI - Surat Keputusan Pemusnahan - Berita acara pemusnahan - Daftar arsip musnah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KA.04.03	c. Penyerahan arsip statis - Surat usulan penyerahan arsip statis - Rekomendasi/pertimbangan/persetujuan penyerahan arsip - Berita acara penyerahan arsip statis - Daftar arsip usul serah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
5	KA.05	Pembuatan Sistem Kearsipan (TND, Klasifikasi, JRA, KKA)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
6	KA.06	Pembinaan Kearsipan					

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KA.06.01	a. Bimbingan teknis kersipan/bimbingan konsultasi kersipan - Perencanaan - Persiapan kegiatan - Pelaksanaan kegiatan - Pelaporan pelaksanaan kegiatan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KA.06.02	b. Supervisi/pengawasan kersipan - Perencanaan - Persiapan kegiatan - Pelaksanaan kegiatan - Pelaporan hasil supervisi/pengawasan kersipan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KA.06.03	c. Monitoring - Perencanaan - Persiapan kegiatan - Pelaksanaan kegiatan - Pelaporan hasil monitoring	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
VIII	PT	KEPUSTAKAAN					

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PT.01	Pengelolaan Bahan Pustaka <ul style="list-style-type: none"> - Daftar buku induk koleksi - Daftar buku terseleksi - Daftar buku dalam pemesanan - Daftar buku dalam permintaan - Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian/hadiah/deposit/ hibah - Daftar pengiriman bahan pustaka surplus - Lembar kerja pengolahan BP (Buras, Pengkatalogan) - <i>Shelt list</i>/jajaran kartu utama (<i>master list</i>) - Daftar tambahan buku (<i>assesion list</i>) - Daftar/jajaran kendali (subyek dan pengarang) 	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
2	PT.02	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka <ul style="list-style-type: none"> - Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit - Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka 	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
3	PT.03	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi					
	PT.03.01	a. Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
	PT.03.02	b. Daftar pengunjung dan peminjam	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PT.03.03	c. Rujukan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
4	PT.04	Preservasi Bahan Pustaka					
	PT.04.01	a. Survei kondisi bahan pustaka - Surat menyurat kegiatan survei - Pelaksanaan survei - Laporan hasil survei	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
	PT.04.02	b. Reprografi bahan pustaka - Surat permohonan reprografi - Laporan hasil reprografi	Biasa/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Humas dan Protokol
IX	KP	KEPEGAWAIAN					
1	KP.01	Formasi Pegawai					
	KP.01.01	a. Usulan dari unit kerja - Analisa jabatan - Analisa beban kerja	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.01.02	b. Usulan permintaan formasi pada Menpan dan RB - Surat permintaan persetujuan formasi pada Menpan dan RB	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.01.03	c. Persetujuan formasi dari Menpan dan RB - Surat persetujuan formasi dari Menpan dan RB	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.01.04	d. Penetapan formasi di Kemen PPPA - SK penetapan formasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.01.05	e. Penetapan formasi khusus - SK penetapan formasi khusus	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
2	KP.02	Pengadaan ASN					
	KP.02.01	a. Proses penerimaan pegawai - Pengumuman melalui media cetak maupun elektronik - Seleksi administrasi - Pemanggilan peserta tes - Pelaksanaan ujian tertulis - Pelaksanaan ujian kesehatan - Keputusan hasil ujian - Wawancara - Keputusan kelulusan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.02.02	b. Penetapan pengumuman kelulusan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.02.03	c. Berkas lamaran yang tidak diterima	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.02.04	d. Nota usul dan kelengkapan penetapan NIP - Surat lamaran - Ijazah - SKCK - Kartu kuning - Surat keterangan dokter - dll (disesuaikan)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.02.05	e. Nota usul dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.02.06	f. SK CASN/ASN kolektif	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	KP.03	Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/Pegawai Kontrak					
	KP.03.01	a. Proses penerimaan ASN P3K <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman penerimaan ASN/P3K - Seleksi administrasi - Pemanggilan peserta test - Pelaksanaan ujian tertulis - Pelaksanaan ujian kesehatan - Kemampuan bidang - Keputusan hasil ujian - Wawancara 	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.03.02	b. Penetapan pengumuman kelulusan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.03.03	c. Pengangkatan ASN P3K <ul style="list-style-type: none"> - Surat lamaran - Ijazah - SKCK - Kartu kuning - Surat keterangan dokter - SK pengangkatan 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.03.04	d. Berkas lamaran yang tidak diterima	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	KP.04	Pengadaan Pegawai Honorer/Harian Lepas					
	KP.04.01	a. Proses penerimaan pegawai <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman penerimaan honorer/harian lepas - Seleksi administrasi - Pemanggilan peserta test - Pelaksanaan ujian tertulis - Pelaksanaan ujian kesehatan - Kemampuan bidang - Keputusan hasil ujian - Wawancara 	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.04.02	b. Penetapan pengumuman kelulusan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.04.03	c. Pengangkatan pegawai honorer/harian lepas <ul style="list-style-type: none"> - Surat lamaran - Ijazah - SKCK - Kartu kuning - Surat keterangan dokter - SK penetapan/perjanjian kerja 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.04.04	d. Berkas lamaran yang tidak diterima	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	KP.05	Pengadaan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama					
	KP.05.01	a. Proses pengadaan jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama - Pengumuman - Seleksi administrasi - Pemanggilan peserta test - Pelaksanaan ujian tertulis - <i>Assesment center</i> - Kompetensi bidang - Keputusan hasil ujian dan wawancara	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.05.02	b. Penetapan pengumuman kelulusan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.05.03	c. Berkas lamaran yang tidak diterima	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.05.04	d. Usul rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.05.05	e. Nota usul ke Presiden	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	KP.06	Pembinaan/Pengembangan Karir Pegawai					
		a. Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ ujian dinas - Edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut - Surat menyurat permohonan atau usulan studi - Laporan hasil tes masuk pendidikan yang dituju - Ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas belajar - Surat perintah/tugas belajar/SK/surat ijin - Laporan perkembangan studi - Ijazah/sertifikat/STTPL - Akreditasi program studi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.06.02	b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.06.03	c. Pakta integritas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi penyelenggaraan negara	Bagian Pengembangan SDM
	KP.06.04	d. Penetapan Angka Kredit (PAK) - DUPAK - PAK	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.06.05	e. Disiplin pegawai - Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.06.06	f. Hukuman disiplin - Surat pemanggilan - Surat peringatan - Berita Acara Pemeriksaan - Pernyataan tidak puas - SK pemberian hukuman disiplin - Permohonan banding - SK ketetapan banding	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.06.07	g. Penghargaan dan tanda jasa - Administrasi - SK - Sertifikat/piagam	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
7	KP.07	Mutasi Pegawai					
	KP.07.01	a. Alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, pindah sementara, mutasi antar unit - Surat permohonan - Surat alih tugas/perpindahan - Surat Keputusan - Surat Tugas - Nota persetujuan/pertimbangan BKN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.07.02	b. Mutasi keluarga - Surat Izin pernikahan/perceraian - Surat penolakan izin - Surat nikah /cerai - Akte kelahiran anak - Surat keterangan adopsi anak - Surat keterangan meninggal dunia	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.07.03	c. Usul kenaikan pangkat golongan - Nota usul kenaikan pangkat/golongan - SK kenaikan pangkat/golongan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.07.04	d. Kenaikan Gaji Berkala - Usulan - Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.07.05	e. Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan - Usulan dan SK Kenaikan Jabatan - Usulan dan SK Pengangkatan Jabatan - Usulan dan SK Pemberhentian Jabatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.07.06	f. Usul penetapan perubahan data dasar/ status/kedudukan hukum pegawai - Usulan - Nota persetujuan - SK - Surat persetujuan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.07.07	g. Peninjauan masa kerja - Usulan - Nota persetujuan - SK - Surat persetujuan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.07.08	h. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) - Administrasi - Notula	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
8	KP.08	Administrasi Pegawai					
	KP.08.01	a. Surat perintah dinas/surat tugas	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.08.02	b. Cuti besar - Surat permohonan cuti - SK cuti	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.08.03	c. Cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan - Surat permohonan cuti - SK cuti	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.08.04	d. Cuti alasan penting - Surat permohonan cuti - SK cuti	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.08.05	e. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) - Surat permohonan cuti - SK cuti	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.08.06	f. Dokumentasi identitas pegawai - Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/ Karsu - LHKASN (Laporan Harta Kekayaan ASN) - LHKKPN (Laporan Harta Kekayaan KPN) - Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan - LP2P/SPT Tahunan/NPWP - KP4	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.08.07	g. Daftar Urut kepangkatan (DUK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
9	KP.09	Kesejahteraan Pegawai					
	KP.09.01	a. Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai - Rekam medis - Kartu anggota - Surat Keterangan Sehat - Surat Keterangan Sakit	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.09.02	b. Asuransi Pegawai/Askes/ BPJS - Administrasi pendaftaran - Penawaran asuransi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.09.03	c. Tabungan perumahan - Administrasi pendaftaran - Penawaran perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						rahasia pribadi	
	KP.09.04	d. Bantuan sosial - Tanda terima - Ucapan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
	KP.09.05	e. Rekreasi, olah raga, kesenian - Penetapan anggaran - Administrasi - Laporan pertanggungjawaban	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
10	KP.10	Perselisihan/Sengketa kepegawaian					
		- Pengaduan - Laporan - Notula - Berita Acara Pemeriksaan - SK	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
11	KP.11	Pemberhentian Pegawai					
		- Usulan pemberhentian pegawai - Penetapan pemberhentian pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM
12	KP.12	Pemberhentian karena Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Tewas					
		- Usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan PNS yang tewas - SK pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan PNS yang tewas - Penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		ASN yang tewas.					
13	KP.13	Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS					
		<ul style="list-style-type: none"> - Berkas lamaran yang diterima - Nota penetapan NIP dan kelengkapannya - Nota persetujuan/pertimbangan Kepala BKN - SK pengangkatan CPNS - Hasil pengujian kesehatan - SK pengangkatan PNS/ASN - SK peninjauan masa kerja - SK kenaikan pangkat - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan - SK pengangkatan dalam jabatan atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional - SK perpindahan wilayah kerja - SK perpindahan antar instansi - SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) - Berita Acara Pemeriksaan - SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN - SK perbantuan/dipekerjakan di luar instansi induk - SK penarikan kembali dari perbantuan/dipekerjakan - SK pemberian uang tunggu - SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara - SK pengalihan PNS - SK pemberhentian sebagai PNS/ASN 	Rahasia	Eselon I, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Pengembangan SDM

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - SK pemberhentian sementara - Surat keterangan pernyataan hilang - Surat keterangan kembalinya PNS yang dinyatakan hilang - SK penggantian nama - Surat perbaikan tanggal tahun kelahiran - Surat Nikah/Cerai - Akta Kelahiran - Isian formulir PUPNS - Berita acara pengambilan sumpah/janji PNS dan jabatan - Surat permohonan menjadi anggota parpol - Surat keterangan mutasi keluarga - Surat keterangan meninggal dunia - Surat keterangan peningkatan pendidikan - Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional - Surat keterangan hasil penelitian khusus - Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala - Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri - Surat izin bepergian ke luar negeri - Kartu pendaftaran ulang (Kardaf) PNS - Ijazah/Sertifikat - SK penempatan/penarikan pegawai - SK pengangkatan pada jabatan di luar instansi induk - Surat pertimbangan status PNS - SK pengaktifan kembali sebagai PNS - Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah - SK pension 					

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
14	KP.14	Berkas Perseorangan Pejabat Eselon I					
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat lamaran - Ijazah - SKCK - Kartu kuning - Surat keterangan dokter - SK pengangkatan - Riwayat jabatan, dll (d disesuaikan) 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
15	KP.15	Berkas Perseorangan ASN P3K/Honorier					
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat lamaran - Ijazah - SKCK - Surat keterangan dokter - SK Pengangkatan, dll (d disesuaikan) 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengembangan SDM
X	KU	KEUANGAN					
1	KU.01	Pelaksanaan Anggaran					
	KU.01.01	a. Rencana Anggaran Biaya	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.01.02	b. Penggajian	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KU.01.03	c. Pengeluaran anggaran	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.01.04	d. Belanja barang habis pakai	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.01.05	e. Belanja barang inventaris/barang modal	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.01.06	f. Belanja jasa	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
2	KU.02	Pengelolaan Perbendaharaan					
	KU.02.01	a. Perbendaharaan - SK Pengangkatan KPA - SK Pengangkatan PPK - SK Pengangkatan Pejabat Penandatanganan SPM - SK Pengangkatan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.02.02	b. Kartu pengawasan kredit anggaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi organisasi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.02.03	c. Pajak	Terbatas	Pimpinan Tinggi	Pengawas	Memiliki dampak	Bagian Keuangan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Setoran Pajak (SSP) - Nota Konfirmasi, dll. 		Madya, Pengawas Internal	Eksternal, Penegak Hukum	yang mengganggu fungsi organisasi	dan Tata Usaha
	KU.02.04	d. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi organisasi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.02.05	e. Pengembalian belanja <ul style="list-style-type: none"> - SSPB - SSBP 	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.02.06	f. Pembukuan anggaran <ul style="list-style-type: none"> - BKU - BKP - Kartu realisasi anggaran - Kartu pengawasan 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi organisasi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
3	KU.03	Verifikasi Anggaran	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
4	KU.04	Akuntansi dan Pelaporan					
	KU.04.01	a. Dokumentasi akuntansi keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Berita acara pemeriksaan kas - Kas/register penutupan kas 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi organisasi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KU.04.02	b. Laporan keuangan tahunan - Laporan keuangan tahunan - Laporan realisasi anggaran - Neraca - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi organisasi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
5	KU.05	Ketatausahaan Keuangan					
	KU.05.01	a. Keterangan penghasilan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia pribadi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.05.02	b. Surat keterangan pemberhentian pembayaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia pribadi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.05.03	c. Pinjaman	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia pribadi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.05.04	d. Iuran keanggotaan organisasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
6	KU.06	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri					

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan pinjaman luar negeri (<i>blue book</i>) - Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (<i>grey book</i>) - Dokumen Memorandum of Understanding (MoU) - Dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dan Dokumen Sejenisnya - Alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu hubungan luar negeri	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
7	KU.07	Sistem Akutansi Instansi (SAI)					
	KU.07.01	a. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi organisasi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.07.02	b. Register Transaksi Harian (RTH) <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Sumber (DS) - Surat Tanda Setoran (STS) - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) - Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) - Surat Perintah Membayar (SPM) 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi organisasi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.07.03	c. Laporan realisasi SAI bulanan/ triwulan/ semester	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
8	KU.08	Pertanggungjawaban Keuangan Negara					

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KU.08.01	a. Laporan hasil pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.08.02	b. Hasil pengawasan dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.08.03	c. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional - LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) - MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) - Tindak Lanjut/Tanggapan LHP	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	KU.08.04	d. Penyelesaian kerugian keuangan negara: - Tuntutan Perbendaharaan/ TP - Tuntutan Ganti Rugi/ TGR	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Keuangan dan Tata Usaha
XI	PL	PERLENGKAPAN					
1	PL.01	Perencanaan Pengadaan					
	PL.01.01	a. Analisa kebutuhan - Data kebutuhan barang - Laporan analisa kebutuhan barang	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	PL.01.02	b. Tata ruang	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PL.01.03	c. Daftar rekanan mampu	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
2	PL.02	Pengadaan Barang dan Jasa					
	PL.02.01	a. Alat tulis kantor	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	PL.02.02	b. Perlengkapan kantor	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	PL.02.03	c. Tanah dan bangunan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	PL.02.04	d. Kendaraan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	PL.02.05	e. Instalasi jaringan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang serius	Bagian Rumah Tangga
3	PL.03	Pengelolaan Barang					

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PL.03.01	a. Penyimpanan/pergudangan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	PL.03.02	b. Distribusi/penyaluran	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	PL.03.03	c. Daftar inventaris ruangan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
4	PL.04	Pemeliharaan					
	PL.04.01	a. Pertamanan/ <i>landscaping</i>	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	PL.04.02	b. Perbaikan gedung	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	PL.04.03	c. Kebersihan gedung dan taman	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	PL.05	Pengelolaan Jaringan Listrik dan Air	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang serius	Bagian Rumah Tangga
6	PL.06	Bukti-Bukti Kepemilikan Aset					
		- Sertifikat tanah - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - BPKB - STNK - Denah/gambar teknik bangunan - Instalasi listrik/saluran air dan gas/jaringan internet	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi organisasi	Bagian Rumah Tangga
7	PL.07	Pemanfaatan Aset					
	PL.07.01	a. Kertas kerja penghitungan tariff	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	PL.07.02	b. Perjanjian kerjasama	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
8	PL.08	Penatausahaan Aset/BMN					
	PL.08.01	a. Inventarisasi BMN	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PL.08.02	b. Penghapusan BMN - Pembentukan Tim - Pendataan barang - Pengajuan penghapusan - Penaksiran harga	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	PL.08.03	c. Pelaporan BMN	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
XII	RT	KERUMAHTANGGAAN					
1	RT.01	Perjalanan Dinas					
	RT.01.01	a. Perjalanan dinas dalam negeri - Surat tugas - SPPD - Laporan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	RT.01.02	b. Perjalanan dinas luar negeri - Undangan - Surat tugas - Pengurusan visa - Surat Sekretaris Kabinet - <i>Exit permit</i> - SPPD - Laporan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Bagian Rumah Tangga
2	RT.02	Kendaraan Dinas					
	RT.02.01	a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas - Pengurusan STNK - Pengurusan BPKB	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RT.02.02	b. Pemeliharaan kendaraan dinas - Dokumen pertanggungjawaban keuangan - Laporan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	RT.02.03	c. Pengurusan kehilangan kendaraan - Laporan kehilangan kendaraan - Berita acara pemeriksaan kehilangan kendaraan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
3	RT.03	Telekomunikasi: Telepon, Radio, Teleks/Fax, CCTV, TV Kabel dan Internet					
	RT.03.01	a. Administrasi telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	RT.03.02	b. Peralatan telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
4	RT.04	Fasilitas Ruang Rapat dan Konsumsi					
		- Administrasi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
5	RT.05	Keamanan dan Ketertiban/Sekuriti					
	RT.05.01	a. Pengamanan/penjagaan dan pengawasan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus - Administrasi - Laporan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RT.05.02	b. Laporan ketertiban dan keamanan - Laporan kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	RT.05.03	c. Pengelolaan CCTV - Laporan kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan keamanan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
	RT.05.04	d. Pengelolaan Parkir	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Rumah Tangga
XIII	PW	PENGAWASAN					
1	PW.01	Program Kerja Pengawasan					
	PW.01.01	a. Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
	PW.01.02	b. Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
	PW.01.03	c. Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PW.01.04	d. Program AKIP unit kerja di lingkungan Kemen PPPA	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
	PW.01.05	e. Program AKIP Kemen PPPA	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
2	PW.02	Pelaksanaan Pengawasan					

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PW.02.01	a. Pengawasan internal - Administrasi pengawasan antara lain: surat penugasan, surat pemberitahuan, dll - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) - Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut - Laporan Reviu RKAKL, Reviu Laporan Keuangan, Reviu Laporan Kinerja dan Reviu Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PW.02.02	b. Pengawasan eksternal - Administrasi pengawasan antara lain: surat penugasan, surat pemberitahuan, dll - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) - Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
	PW.02.03	c. Pengawasan khusus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
3	PW.03	Pemantauan					
	PW.03.01	a. Pemantauan kegiatan - Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK) - Monitoring Reformasi Birokrasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PW.03.02	b. Pemantauan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kehilangan - Berita acara kehilangan barang/uang - SK Pertanggungjawaban Mutlak - Surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara - SK penghapusan uang dan barang - Laporan penyelesaian TP/TGR 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
	PW.03.03	c. Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
	PW.03.04	d. Penerapan <i>early warning system</i>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
	PW.03.05	e. Pemantauan disiplin pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
4	PW.04	Gratifikasi dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)					
		- Pelaporan gratifikasi dan WBS	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	PW.05	Kegiatan Pengawasan Lainnya					
	PW.05.01	a. Sosialisasi pengawasan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
	PW.05.02	b. Bimbingan, konsultasi dan asistensi pengawasan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
	PW.05.03	c. Pendidikan dan pelatihan pengawasan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
	PW.05.04	d. Pemaparan hasil pengawasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
	PW.05.05	e. Keikutsertaan dalam Forum APIP	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
	PW.05.06	f. Satuan Pengawasan Intern (SPI)/ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
XIV	DT	DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI					
1	DT.01	Rencana Strategis/ Master Plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
2	DT.02	Rencana Pembangunan dan Pengembangan TI	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
3	DT.03	Rancang Bangun Sistem/ Design Sistem Informasi Dan Komunikasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
4	DT.04	Dokumentasi Arsitektur					
	DT.04.01	a. Sistem Aplikasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
	DT.04.02	b. Infrastruktur dan Keamanan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
5	DT.05	Dokumentasi Implementasi, Operasional, dan Pemeliharaan					
	DT.05.01	a. Implementasi, operasional dan pemeliharaan aplikasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DT.05.02	b. Implementasi, operasional, dan pemeliharaan infrastruktur dan keamanan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
6	DT.06	Perekaman dan Pemutakhiran Data	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
7	DT.07	Migrasi dan Integrasi Data/Aplikasi					
	DT.07.01	a. Jaringan dan <i>Server</i>	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
	DT.07.02	b. Data dan Aplikasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
8	DT.08	Keamanan Data					
	DT.08.01	a. <i>Backup</i> data	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
	DT.08.02	b. Anti virus	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DT.08.03	c. <i>Firewall</i>	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
9	DT.09	Dokumen <i>Hosting</i> dan <i>Domain</i>					
		- Formulir permintaan <i>hosting</i> - Laporan hasil uji kelayakan - Laporan pelaksanaan <i>hosting</i>	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
10	DT.10	Pengumpulan dan Pengolahan Data					
			Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
11	DT.11	Analisa Data					
			Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban	Bagian Data
12	DT.12	Penyajian dan Pemanfaatan Data					
			Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
13	DT.13	Data Base					
	DT.13.01	a. Data Gender	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DT.13.02	b. Data Anak	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
14	DT.14	Evaluasi Teknologi Informasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data
15	DT.15	Keanggotaan/Langgan/Jaringan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Data

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KG	KESETARAAN GENDER					
1	KG.01	Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan dan Keamanan					
	KG.01.01	a. Kebijakan Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KG.01.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam
	KG.01.03	c. Fasilitasi Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam
	KG.01.04	d. Advokasi Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam
	KG.01.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam
	KG.01.06	f. Monitoring dan Evaluasi Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam
2	KG.02	Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi					
	KG.02.01	a. Kebijakan Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KG.02.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
	KG.02.03	c. Fasilitasi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
	KG.02.04	d. Advokasi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
	KG.02.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
	KG.02.06	f. Monitoring dan Evaluasi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	KG.03	Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga					
	KG.03.01	a. Kebijakan Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga
	KG.03.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga
	KG.03.03	c. Fasilitasi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga
	KG.03.04	d. Advokasi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KG.03.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga
	KG.03.06	f. Monitoring dan Evaluasi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga
4	KG.04	Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan					
	KG.04.01	a. Kebijakan Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
	KG.04.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
	KG.04.03	c. Fasilitasi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KG.04.04	d. Advokasi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
	KG.04.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
	KG.04.06	f. Monitoring dan Evaluasi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
5	KG.05	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)					
		- Penilaian dinas-dinas terkait pemberdayaan perempuan - Instrumen penilaian - Verifikasi lapangan sampai penetapan pemenang	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
II	PP	PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN					
1	PP.01	Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga					
	PP.01.01	a. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PP.01.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga
	PP.01.03	c. Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga
	PP.01.04	d. Advokasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga
	PP.01.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga
	PP.01.06	f. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PP.02	Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan					
	PP.02.01	a. Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
	PP.02.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
	PP.02.03	c. Fasilitasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
	PP.02.04	d. Advokasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
	PP.02.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
	PP.02.06	f. Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PP.03	Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus					
	PP.03.01	a. Kebijakan Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
	PP.03.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
	PP.03.03	c. Fasilitasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
	PP.03.04	d. Advokasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
	PP.03.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PP.03.06	f. Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
4	PP.04	Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang					
	PP.04.01	a. Kebijakan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
	PP.04.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
	PP.04.03	c. Fasilitasi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Tidana Perdagangan Orang	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
	PP.04.04	d. Advokasi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Tidana Perdagangan Orang	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PP.04.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
	PP.04.06	f. Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
III	PA	PERLINDUNGAN ANAK					
1	PA.01	Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi					
	PA.01.01	a. Kebijakan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
	PA.01.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
	PA.01.03	c. Fasilitasi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PA.01.04	d. Advokasi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
	PA.01.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
	PA.01.06	f. Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
2	PA.02	Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi					
	PA.02.01	a. Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi
	PA.02.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi
	PA.02.03	c. Fasilitasi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PA.02.04	d. Advokasi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi
	PA.02.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi
	PA.02.06	f. Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi
3	PA.03	Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus					
	PA.03.01	a. Kebijakan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
	PA.03.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
	PA.03.03	c. Fasilitasi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PA.03.04	d. Advokasi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
	PA.03.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
	PA.03.06	f. Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
4	PA.04	Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi					
	PA.04.01	a. Kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
	PA.04.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
	PA.04.03	c. Fasilitasi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PA.04.04	d. Advokasi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
	PA.04.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
	PA.04.06	f. Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
IV	TK	TUMBUH KEMBANG ANAK					
1	TK.01	Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak					
	TK.01.01	a. Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
	TK.01.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
	TK.01.03	c. Fasilitasi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TK.01.04	d. Advokasi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
	TK.01.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
	TK.01.06	f. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
2	TK.02	Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan					
	TK.02.01	a. Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan
	TK.02.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan
	TK.02.03	c. Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TK.02.04	d. Advokasi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan
	TK.02.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan
	TK.02.06	f. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan
3	TK.03	Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan					
	TK.03.01	a. Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan
	TK.03.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TK.03.03	c. Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan
	TK.03.04	d. Advokasi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan
	TK.03.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan
	TK.03.06	f. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan
4	TK.04	Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya					
	TK.04.01	a. Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TK.04.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya
	TK.04.03	c. Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya
	TK.04.04	d. Advokasi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya
	TK.04.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya
	TK.04.06	f. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	TK.05	Kabupaten/Kota Layak Anak	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
V	PM	PARTISIPASI MASYARAKAT					
1	PM.01	Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha					
	PM.01.01	a. Kebijakan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
	PM.01.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
	PM.01.03	c. Fasilitasi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
	PM.01.04	d. Advokasi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PM.01.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
	PM.01.06	f. Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
2	PM.02	Partisipasi Media					
	PM.02.01	a. Kebijakan Partisipasi Media	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Media
	PM.02.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Partisipasi Media	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Media
	PM.02.03	c. Fasilitasi Partisipasi Media	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Media
	PM.02.04	d. Advokasi Partisipasi Media	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Partisipasi Media

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PM.02.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Partisipasi Media	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Media
	PM.02.06	f. Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Media	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Media
3	PM.03	Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan					
	PM.03.01	a. Kebijakan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
	PM.03.02	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
	PM.03.03	c. Fasilitasi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
	PM.03.04	d. Advokasi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengungkapkan privasi korban	Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PM.03.05	e. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pelatihan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
	PM.03.06	f. Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
VI	SA	KAJIAN TENTANG PP DAN PA					
1	SA.01	Telaah dan Kajian Bidang Pembangunan Keluarga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Staf Ahli Menteri
2	SA.02	Telaah dan Kajian Bidang Hubungan Antar Lembaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Staf Ahli Menteri
3	SA.03	Telaah dan Kajian Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Staf Ahli Menteri
4	SA.04	Telaah dan Kajian Bidang Komunikasi Pembangunan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Staf Ahli Menteri

NO.	KODE KLASIFIKASI ARSIP	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	SA.05	Forum Analisis Kebijakan dan Pemantauan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Staf Ahli Menteri
VII	DM	PENGADUAN MASYAKARAT					
1	DM.01	Permasalahan Perempuan dan Anak	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengaduan Masyarakat
2	DM.02	Tindak Lanjut Pengaduan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengaduan Masyarakat
3	DM.03	Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bagian Pengaduan Masyarakat

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

